



PESANTRENOFOBIA SEBAGAI FENOMENA SOSIAL (Antara Ketakutan, Misinformasi, dan Krisis Kepercayaan)

Muchammad Machrus Zaman

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

email: mahruszaman145@gmail.com

Received : 06 November 2025 | Revised : 16 Desember 2025 | Accepted : 14 Januari 2026

Abstract

The phenomenon of pesantrenophobia, or social fear toward Islamic boarding schools (pesantren), has emerged as a new sociocultural symptom in modern Indonesian society. Pesantren, which should ideally function as centers of moral, spiritual, and social formation, are increasingly perceived negatively by segments of the public. In reality, amid the rapid flow of modernization and digital information, pesantren are often portrayed as closed, outdated institutions, even associated with issues of violence and intolerance. This reflects a gap between the ideal role of pesantren as enlighteners of the ummah and the social perceptions constructed in public discourse. This study aims to explore the socio-cultural roots of pesantrenophobia, analyze the role of media and misinformation in reinforcing negative images of pesantren, and identify strategies for reconstructing pesantren's public image and social communication to rebuild public trust. A qualitative descriptive approach was employed, using Social Construction Theory, Framing Theory, and Social Trust Theory as analytical frameworks. The findings reveal that pesantrenophobia stems from the social distance between modern society and pesantren traditions, the historical legacy of colonial discourse portraying pesantren as conservative entities, and the reproduction of negative imagery through media framing and misinformation. Nevertheless, the study also identifies ongoing efforts to reconstruct pesantren's image through open social communication, digital transformation of pesantren values, and rebranding of pesantren's humanitarian and educational roles.

Keywords: *Pesantrenophobia, Social Contruction, Public Trust*

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki akar kuat dalam sejarah sosial dan budaya bangsa. Sejak masa Walisongo hingga era modern, pesantren berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu keagamaan, tempat pembentukan moral, serta benteng penjaga nilai-nilai tradisional di tengah perubahan zaman. Dalam sejarahnya, pesantren tidak hanya menjadi ruang belajar agama, tetapi juga wadah perjuangan sosial dan kebangsaan. Banyak tokoh kemerdekaan dan pemikir Islam moderat lahir dari lingkungan pesantren yang menjunjung tinggi kemandirian, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Namun, di balik peran besarnya itu, posisi pesantren kini menghadapi tantangan baru yang tidak selalu bersifat material atau administratif, melainkan menyangkut citra dan persepsi publik.

Beberapa tahun terakhir, muncul fenomena sosial yang dapat disebut sebagai pesantrenofobia, yakni ketakutan, kecurigaan, atau prasangka negatif terhadap dunia pesantren. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya eksposur media terhadap isu-isu yang melibatkan individu atau lembaga pesantren, baik dalam konteks kasus moral, kekerasan, maupun radikalisme. Istilah pesantrenofobia di sini digunakan secara analitis untuk menggambarkan gejala sosial di mana sebagian masyarakat mengalami disonansi kognitif terhadap pesantren; di satu sisi mengakui nilai keagamaannya, namun di sisi lain merasa canggung, skeptis, bahkan takut terhadap sistem pendidikan atau lingkungan pesantren. Fenomena ini memperlihatkan adanya jurang persepsi antara pesantren dan masyarakat yang kian melebar di tengah derasnya arus informasi digital.

Salah satu faktor penting yang melatarbelakangi munculnya pesantrenofobia adalah perubahan pola komunikasi sosial di era media massa dan media digital. Dalam konteks ini, pesantren kerap menjadi korban konstruksi media yang tidak proporsional. Kasus-kasus negatif yang terjadi di sebagian kecil pesantren sering kali digeneralisasi sebagai potret utuh dari seluruh lembaga pesantren di Indonesia. Media yang berorientasi pada sensasionalisme lebih memilih menonjolkan sisi kontroversial daripada sisi edukatif dan spiritual pesantren. Akibatnya, publik yang terpapar informasi semacam ini membentuk persepsi keliru dan menciptakan citra negatif terhadap lembaga yang sesungguhnya berperan penting dalam pembentukan moral bangsa.

Selain faktor media, pesantrenofobia juga muncul akibat krisis pemahaman sosial terhadap fungsi dan karakteristik pesantren. Masyarakat modern yang cenderung

mengedepankan rasionalitas dan efisiensi sering kali memandang pesantren sebagai lembaga konservatif dan tidak adaptif terhadap perubahan zaman. Stereotip bahwa pesantren hanya mengajarkan “*ilmu kuno*” atau “*tidak produktif secara ekonomi*” menjadi bentuk reduksi terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini dijaga pesantren, seperti keikhlasan, adab, dan keutuhan spiritualitas. Ketidaksamaan cara pandang ini menumbuhkan jarak kultural antara pesantren dan masyarakat sekitar yang lebih modern, sehingga muncul kesalahpahaman dalam memaknai peran pesantren di tengah realitas sosial kontemporer.

Lebih jauh, pesantrenofobia juga berakar pada fenomena misinformasi dan disinformasi yang berkembang pesat di media sosial. Berita bohong, potongan video tanpa konteks, atau narasi provokatif sering kali disebarkan untuk membentuk opini negatif terhadap lembaga keagamaan, termasuk pesantren. Dalam situasi seperti ini, pesantren yang selama ini fokus pada pendidikan internal sering kali kurang siap menghadapi tantangan komunikasi publik. Tidak sedikit pesantren yang tidak memiliki saluran resmi untuk melakukan klarifikasi atau membangun citra positif. Akibatnya, opini publik terbentuk sepihak tanpa adanya narasi penyeimbang yang memadai.

Fenomena pesantrenofobia tidak hanya berdampak pada citra institusional, tetapi juga pada hubungan sosial antara pesantren dan masyarakat. Ketika rasa curiga dan takut berkembang, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pesantren menurun, minat menyekolahkan anak ke pesantren melemah, bahkan beberapa pesantren menghadapi resistensi sosial di lingkungannya sendiri. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya krisis kepercayaan (*trust deficit*) antara masyarakat dan lembaga pendidikan Islam tradisional. Padahal, dalam sistem sosial Indonesia yang religius, kepercayaan merupakan modal sosial utama untuk menjaga stabilitas hubungan antar kelompok dan memperkuat kohesi sosial.

Tulisan ini berangkat dari keprihatinan terhadap gejala sosial tersebut dan berupaya melacak akar sosial dari munculnya pesantrenofobia di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana ketakutan, misinformasi, dan krisis kepercayaan terbentuk melalui proses komunikasi sosial antara pesantren dan masyarakat. Penelitian ini juga akan menelaah bagaimana konstruksi media, persepsi publik, dan perubahan orientasi nilai masyarakat modern berperan dalam memperkuat atau memperlemah relasi

sosial dengan pesantren. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif terhadap hubungan sosial-keagamaan di era digital.

Secara fokus pembahasan, penelitian ini diarahkan pada tiga dimensi penting: *pertama*, menelusuri akar ketakutan dan stereotip terhadap pesantren dalam konteks sosial dan kultural; *kedua*, menganalisis peran media dan misinformasi dalam memperkuat citra negatif pesantren; dan *ketiga*, mengidentifikasi strategi rekonstruksi citra dan komunikasi sosial pesantren untuk membangun kembali kepercayaan publik. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pesantren dapat beradaptasi dengan realitas komunikasi modern tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya.

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua sisi: secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya literatur tentang sosiologi agama, komunikasi publik, dan studi pesantren di Indonesia. Kajian ini juga berpotensi melahirkan konsep-konsep baru terkait konstruksi citra lembaga keagamaan dalam masyarakat modern. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola pesantren, pemerintah, dan masyarakat luas untuk membangun komunikasi yang sehat dan transparan. Pesantren perlu mengembangkan strategi komunikasi berbasis literasi digital dan partisipasi masyarakat agar citra positifnya dapat terus terjaga dan dipercaya publik di tengah arus informasi yang semakin terbuka.

KERANGKA TEORI

Fenomena pesantrenofobia sebagai bentuk ketakutan dan prasangka sosial terhadap lembaga pesantren tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan moral atau keagamaan, tetapi perlu dikaji dari perspektif sosiologis dan komunikasi sosial. Ketakutan terhadap pesantren bukanlah gejala yang muncul secara spontan, melainkan hasil dari proses sosial yang panjang, di mana makna, citra, dan persepsi tentang pesantren dikonstruksi, disebarkan, dan diterima masyarakat melalui mekanisme komunikasi publik. Untuk memahami proses tersebut, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yang saling terkait, yaitu teori konstruksi sosial atas realitas (Berger & Luckmann, 1966), teori framing (Entman, 1993), dan teori kepercayaan sosial (Luhmann, 1979; Fukuyama, 1995).

1. Teori Konstruksi Sosial atas Realitas

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya klasiknya *The Social Construction of Reality* (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk, dipertahankan, dan diubah melalui interaksi sosial yang berulang. Individu dan kelompok sosial tidak hidup dalam realitas yang objektif, melainkan dalam dunia makna yang dikonstruksi melalui komunikasi dan pengalaman bersama. Dalam pandangan ini, realitas dibangun melalui tiga proses: eksternalisasi, yaitu saat individu mengekspresikan pemahaman atau nilai ke dalam dunia sosial; objektivasi, ketika ekspresi tersebut diterima secara sosial dan menjadi fakta kolektif; serta internalisasi, yakni ketika fakta sosial itu diadopsi dan diyakini sebagai kebenaran pribadi.

Dalam konteks penelitian ini, pesantrenofobia merupakan hasil konstruksi sosial atas citra pesantren. Melalui proses komunikasi sosial, media, dan wacana publik, pesantren tidak hanya dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga diberi makna baru yang bersifat *negative*, misalnya sebagai tempat yang kolot, tertutup, bahkan berpotensi melahirkan radikalisme. Persepsi tersebut, setelah berulang kali diucapkan dan disebarluaskan, menjadi realitas sosial yang diterima masyarakat luas tanpa melalui verifikasi empiris. Dengan demikian, teori konstruksi sosial membantu menjelaskan bagaimana ketakutan terhadap pesantren terbentuk secara kultural melalui komunikasi dan pengalaman sosial yang terus direproduksi.

2. Teori Framing

Untuk memahami bagaimana proses konstruksi tersebut bekerja secara konkret, terutama melalui media massa, penelitian ini menggunakan teori framing dari Robert Entman (1993). Menurut Entman, *to frame* berarti memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi, sehingga membentuk cara pandang tertentu terhadap peristiwa yang diberitakan. Framing berfungsi mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, menilai secara moral, dan menyarankan solusi. Dengan kata lain, media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga menanamkan cara berpikir kepada publik tentang bagaimana memahami suatu peristiwa.

Dalam fenomena pesantrenofobia, framing media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik. Kasus pelanggaran moral atau kekerasan yang melibatkan individu di pesantren sering kali dibingkai sebagai “masalah sistemik pesantren”, bukan sebagai kesalahan personal. Pola pemberitaan seperti ini memperluas efek generalisasi: publik kemudian menilai bahwa seluruh pesantren memiliki karakter serupa. Dalam ruang digital, framing juga terjadi melalui potongan video, narasi provokatif, dan komentar emosional yang tersebar di media sosial tanpa konteks. Teori framing membantu penelitian ini menganalisis bagaimana media dan pengguna digital membentuk narasi negatif tentang pesantren, dan bagaimana narasi tersebut memicu reaksi sosial berupa ketakutan dan ketidakpercayaan.

Dengan demikian, teori framing berfungsi sebagai alat analisis mikro yang menelusuri pola-pola wacana dan struktur berita yang memunculkan pesantrenofobia. Sementara teori konstruksi sosial bekerja pada level makro untuk menjelaskan bagaimana hasil framing tersebut diterima dan dilembagakan sebagai kebenaran sosial.

3. Teori Kepercayaan Sosial

Setelah memahami bagaimana realitas pesantrenofobia dikonstruksi dan disebarluaskan, langkah berikutnya adalah menelaah dampak sosial dari proses tersebut. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teori kepercayaan sosial (*social trust theory*) sebagaimana dikembangkan oleh Niklas Luhmann (1979) dan Francis Fukuyama (1995). Luhmann menyebut kepercayaan sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan individu atau kelompok bertindak dalam situasi ketidakpastian. Tanpa kepercayaan, hubungan sosial menjadi rapuh dan masyarakat tidak dapat berfungsi secara stabil. Fukuyama menambahkan bahwa tingkat kepercayaan merupakan modal sosial utama bagi kemajuan masyarakat; ia membedakan antara masyarakat dengan *high-trust society* dan *low-trust society*, di mana lembaga-lembaga sosial memainkan peran sentral dalam membangun kepercayaan publik.

Dalam konteks penelitian ini, pesantrenofobia menandakan terjadinya krisis kepercayaan (*trust deficit*) antara masyarakat dan pesantren. Ketika masyarakat terus terpapar pada framing negatif dan misinformasi, persepsi mereka terhadap integritas pesantren melemah. Ketidakpercayaan ini kemudian berimplikasi pada menurunnya partisipasi sosial, resistensi terhadap lembaga keagamaan, serta menurunnya minat

masyarakat menyekolahkan anak ke pesantren. Teori kepercayaan sosial membantu penelitian ini menjelaskan dampak nyata dari pesantrenofobia terhadap relasi sosial, serta menjadi dasar untuk merumuskan strategi rekonstruksi kepercayaan melalui komunikasi publik yang terbuka, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai keislaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fenomena pesantrenofobia merupakan gejala sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau statistik, tetapi perlu pemahaman mendalam terhadap makna, persepsi, dan interaksi sosial yang melatarinya. Jenis deskriptif-analitis digunakan untuk memotret gejala sosial pesantrenofobia secara faktual dan mendalam, bagaimana bentuknya di masyarakat, apa faktor penyebabnya, bagaimana media berperan, serta bagaimana pesantren dan publik meresponsnya. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan analisis kritis terhadap dinamika relasi antara pesantren dan masyarakat di tengah perubahan sosial dan digitalisasi informasi.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menerapkan analisis teori konstruksi sosial, framing media, dan kepercayaan sosial secara simultan untuk menafsirkan hasil temuan lapangan dan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif Miles & Huberman (1994). Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori yang telah dipilih, untuk menemukan makna sosial dari pesantrenofobia serta implikasinya terhadap hubungan antara pesantren dan masyarakat. Tahap akhir adalah penyusunan laporan penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang memuat temuan, diskusi, dan rekomendasi strategis untuk membangun kembali kepercayaan sosial terhadap lembaga pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Ketakutan terhadap Pendidikan Pesantren: Prespektif Sosial dan Kultur

Fenomena pesantrenofobia bukanlah sekadar wujud prasangka spontan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam, melainkan hasil dari proses sosial dan kultural yang

panjang. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketakutan terhadap pesantren memiliki akar yang kompleks, yang tumbuh dari kombinasi faktor sejarah, perubahan sosial, dan reproduksi makna negatif yang terus menerus diulang dalam wacana publik. Ketakutan ini tidak semata-mata muncul karena peristiwa tertentu, tetapi karena konstruksi sosial yang menciptakan citra baru tentang pesantren di benak masyarakat modern.

1. Akar Sosial: Perubahan Struktur Masyarakat dan Presepsi Kelas

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia mengalami transformasi sosial yang cepat sejak dua dekade terakhir. Modernisasi dan urbanisasi mendorong pergeseran nilai dari kolektivitas religius menuju individualitas pragmatis. Dalam konteks ini, pesantren sering kali diposisikan sebagai representasi “*masa lalu*” lembaga tradisional yang dianggap tertinggal dari arus kemajuan teknologi dan modernitas pendidikan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah perkotaan cenderung memiliki persepsi negatif terhadap pesantren karena menganggap sistemnya terlalu tertutup dan disiplin keras. Salah satu responden menyebut bahwa “*pesantren lebih menekankan hafalan ketimbang berpikir kreatif.*” Persepsi seperti ini lahir dari ketidaktahuan dan jarak sosial antara masyarakat modern dan tradisi pesantren.

Menggunakan perspektif teori konstruksi sosial (Berger & Luckmann, 1966), dapat dijelaskan bahwa citra “*pesantren sebagai lembaga kolot*” merupakan hasil objektivasi makna yang dibangun oleh masyarakat perkotaan melalui proses eksternalisasi nilai modernitas. Mereka menilai pesantren berdasarkan standar sekolah umum, bukan pada sistem epistemik pesantren sendiri. Dalam jangka panjang, konstruksi ini menciptakan realitas sosial yang menempatkan pesantren sebagai *the other* entitas yang berbeda, bahkan menakutkan karena tidak dipahami.

2. Akar Kultural: Warisan Narasi Historis dan Simbol Religiusitas

Dari aspek kultural, ketakutan terhadap pesantren juga berakar pada warisan narasi historis dan simbolik yang terbentuk sejak masa kolonial hingga kini. Pada masa kolonial Belanda, pesantren sering dicurigai sebagai pusat perlawanan dan gerakan keagamaan yang mengancam stabilitas politik. Stigma itu secara tidak langsung diwariskan ke masa modern melalui sistem pendidikan kolonial yang lebih mengutamakan model sekuler dan rasionalistik.

Penelitian ini menemukan bahwa hingga kini masih ada masyarakat yang menganggap pesantren sebagai tempat “*pembentukan fanatisme*” atau “*keterbelakangan*.” Narasi tersebut terus direproduksi melalui simbol-simbol budaya dan representasi visual, santri dengan sarung dan kopiah dianggap lambang konservatisme, bukan kearifan. Padahal, pesantren memiliki kekayaan budaya dan spiritual yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam perspektif teori framing (Entman, 1993), fenomena ini menunjukkan bahwa media dan wacana publik berperan penting dalam mempertahankan konstruksi kultural tersebut. Framing pemberitaan tentang pesantren sering kali hanya muncul ketika terjadi kasus kekerasan, pencabulan, atau isu ekstremisme. Narasi positif, seperti inovasi pendidikan, kiprah pesantren dalam pemberdayaan ekonomi, atau peran sosial kiai, jarang mendapatkan ruang yang sama. Akibatnya, publik menerima pesan yang bias dan parsial, yang memperkuat asosiasi negatif terhadap pesantren.

Dengan kata lain, media tidak hanya melaporkan pesantren, tetapi membingkai pesantren sebagai “*sumber ancaman*.” Dalam penelitian ini ditemukan beberapa contoh tajuk berita dan konten digital yang memperlihatkan pola itu: penggunaan istilah “*pondok mengerikan*”, “*santri korban*”, atau “*kiai predator*” tanpa memisahkan kasus individu dari sistem kelembagaan. Proses ini memperluas persepsi ketakutan yang tidak proporsional, menimbulkan efek domino berupa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan.

Peran Media dan Misinformasi dalam Memperkuat Citra Negatif Pesantren

Isu pesantrenofobia tidak mungkin tumbuh tanpa media. Media modern, baik konvensional maupun digital memegang peran dominan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pesantren. Dalam konteks masyarakat informasi, citra pesantren tidak lagi dibentuk semata oleh interaksi langsung, tetapi oleh narasi yang diproduksi, diseleksi, dan disebarluaskan melalui media massa serta jejaring sosial digital. Penelitian ini menemukan bahwa media telah menjadi arena konstruksi makna yang memediasi hubungan antara pesantren dan publik, di mana framing dan misinformasi berperan besar dalam memperkuat persepsi negatif yang menimbulkan pesantrenofobia.

1. Media sebagai Agen Kontruksi Sosial

Berdasarkan teori konstruksi sosial atas realitas (Berger & Luckmann, 1966), media bukan hanya saluran informasi, melainkan lembaga yang berperan membentuk realitas sosial. Media menyeleksi fakta, memberi konteks, dan menghadirkan interpretasi tertentu yang kemudian diterima publik sebagai kebenaran. Dalam konteks ini, realitas tentang pesantren yang diterima masyarakat tidak selalu identik dengan realitas empiris di lapangan.

Temuan wawancara dengan beberapa pengasuh pesantren menunjukkan bahwa media sering kali hanya hadir ketika terjadi kasus negatif. Salah satu kiai menuturkan, “*Kalau ada santri berprestasi, tidak diliput. Tapi kalau ada satu kasus kecil, langsung jadi berita utama.*” Pernyataan ini menunjukkan adanya pola ketimpangan dalam representasi pesantren. Pesantren dikonstruksi bukan sebagai lembaga pendidikan yang dinamis, tetapi sebagai ruang potensial bagi penyimpangan.

Pola ini selaras dengan hasil analisis dokumen media yang menunjukkan kecenderungan *selective exposure*, media lebih banyak menyoroti isu-isu sensasional seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau radikalisme yang dikaitkan dengan pesantren. Dalam jangka panjang, paparan seperti ini membentuk *collective imagery* bahwa pesantren identik dengan kekerasan dan kemandekan intelektual.

Dengan demikian, media berperan dalam proses objektivasi realitas tentang pesantren. Melalui pemberitaan berulang, konstruksi negatif itu menjadi realitas yang dianggap “wajar” di mata publik. Di sinilah peran teori konstruksi sosial menjadi relevan: ketakutan masyarakat terhadap pesantren lahir dari konstruksi makna yang disebarkan secara terus-menerus, bukan dari pengalaman empiris langsung.

Untuk memahami bagaimana konstruksi ini bekerja secara operasional, digunakan teori framing sebagaimana dijelaskan oleh Robert Entman (1993). Framing merupakan cara media menyeleksi aspek tertentu dari realitas dan menonjolkannya untuk membentuk cara pandang publik. Dalam analisis ini, ditemukan beberapa pola framing yang berulang dalam pemberitaan tentang pesantren di media daring nasional.

Pertama, framing masalah (*problem definition*). Kasus individual seperti kekerasan atau pelanggaran moral sering didefinisikan sebagai “masalah sistemik pesantren”, seolah-olah seluruh lembaga pesantren bermasalah secara struktural.

Kedua, framing kausalitas (*causal interpretation*). Penyebab masalah sering dihubungkan dengan “budaya pesantren yang tertutup” atau “sistem pengawasan yang lemah”, tanpa membedakan antara lembaga satu dengan yang lain.

Ketiga, framing moral (*moral evaluation*). Pesantren diposisikan dalam wacana moralitas yang bias, seakan menjadi simbol kemunafikan religius. *Keempat*, framing solusi (*treatment recommendation*). Media sering menuntut “reformasi pesantren” tanpa memahami keragaman sistem pesantren di Indonesia.

Dengan pola seperti ini, media menciptakan narasi yang secara halus menanamkan persepsi bahwa pesantren adalah lembaga bermasalah. Analisis ini menunjukkan bahwa framing bukan sekadar penyajian berita, tetapi juga alat ideologis yang membentuk persepsi publik tentang siapa yang dipercaya dan siapa yang dicurigai.

2. Misinformasi di Era Digital: Produksi Ketakutan Baru

Selain media arus utama, fenomena pesantrenofobia juga diperkuat oleh misinformasi digital. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial seperti X (*Twitter*), *Facebook*, dan *TikTok* menjadi ruang paling aktif dalam menyebarkan potongan video, narasi provokatif, atau testimoni yang tidak diverifikasi. Potongan video berdurasi 30 detik sering kali dilepaskan dari konteksnya dan diberi narasi “*santri disiksa di pesantren*” atau “*kiai menindas santri*”.

Wawancara dengan dua jurnalis muda memperkuat temuan ini. Salah satunya menyatakan bahwa masyarakat kini lebih mempercayai narasi viral dibanding berita resmi, karena “apa yang muncul di lini masa dianggap kebenaran.” Fenomena ini menggambarkan apa yang disebut Berger sebagai “internalisasi realitas sekunder”, di mana masyarakat hidup dalam realitas yang dibangun oleh media digital, bukan oleh pengalaman sosial langsung.

Misinformasi digital mempercepat proses pembentukan ketakutan imajiner, ketakutan terhadap pesantren tanpa pengalaman empiris. Ketakutan ini bersifat simbolik, karena dibangun oleh citra dan emosi, bukan oleh data dan dialog. Dengan

kata lain, masyarakat mengalami pesantren melalui cermin media, bukan dari relasi sosial nyata.

Dampak utama dari dominasi media dan misinformasi ini adalah terbentuknya efek sirkular antara persepsi dan kepercayaan sosial. Ketika media terus membingkai pesantren secara negatif, masyarakat menjadi lebih curiga dan kehilangan rasa percaya. Ketika kepercayaan menurun, berita negatif semakin mudah dipercaya, sehingga siklus ketakutan semakin kuat.

Dalam perspektif teori kepercayaan sosial (Fukuyama, 1995), kondisi ini menciptakan *trust deficit* yang mengancam modal sosial pesantren. Ketika kepercayaan publik melemah, pesantren kehilangan posisi sebagai lembaga moral dan pendidikan yang dipercaya. Akibatnya, peran pesantren dalam membentuk karakter dan spiritualitas masyarakat terancam terpinggirkan oleh dominasi opini media.

Fenomena ini juga memperlihatkan pergeseran otoritas sosial: dari kiai dan ulama ke “*influencer*” digital. Di era algoritmik, siapa yang memiliki *engagement* tinggi menjadi sumber kebenaran baru, bahkan ketika informasinya tidak akurat. Ketimpangan otoritas inilah yang memperparah pesantrenofobia.

Strategi Rekonstruksi Citra dan Komunikasi Sosial Pesantren

Setelah mengalami serangan wacana dan misinformasi yang berulang, pesantren kini berada di fase penting dalam sejarah sosialnya: fase rekonstruksi citra. Tantangan pesantren bukan lagi sekadar mempertahankan tradisi, tetapi bagaimana mengartikulasikan kembali identitasnya di tengah publik yang terpapar informasi digital. Melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis media, penelitian ini menemukan bahwa upaya rekonstruksi citra pesantren berlangsung melalui tiga poros utama: komunikasi sosial yang terbuka, digitalisasi nilai-nilai pesantren, dan rebranding peran sosial pesantren.

1. Komunikasi Sosial yang Mudah dan Adaptif

Pesantren memiliki tradisi komunikasi yang kuat melalui majelis, dakwah, dan hubungan personal antara kiai dan santri. Namun, dalam konteks modern, pola komunikasi ini perlu diperluas menjadi komunikasi publik yang terbuka. Berdasarkan teori komunikasi strategis (Grunig & Hunt, 1984), lembaga yang ingin

mempertahankan kepercayaan publik harus membangun komunikasi dua arah (*two-way symmetrical communication*) yakni komunikasi yang mendengar, merespons, dan menyesuaikan diri terhadap aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pesantren kini mulai menerapkan prinsip keterbukaan informasi, misalnya dengan mengadakan open house pesantren, publikasi laporan kegiatan sosial, serta kolaborasi dengan media lokal. Hal ini berfungsi sebagai bentuk *trust repair mechanism*, sebuah strategi memperbaiki hubungan publik melalui transparansi dan keterlibatan.

Dalam wawancara, salah satu pengasuh pesantren mengatakan:

“Kami tidak bisa hanya menunggu media menulis tentang kami. Kami harus jadi sumber berita bagi kebaikan pesantren sendiri.”

Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran baru: pesantren tidak cukup menjadi objek pemberitaan, tetapi harus menjadi subjek komunikasi sosial. Dengan membuka ruang dialog public, baik melalui forum tatap muka maupun *platform* digital, pesantren dapat menampilkan sisi humanisnya, serta menunjukkan bahwa nilai-nilai pesantren tetap relevan dengan kehidupan modern.

Transformasi digital menjadi kunci rekonstruksi citra pesantren. Dalam perspektif teori komunikasi digital dan rebranding kelembagaan, pesantren harus masuk ke ekosistem media dengan membawa narasi tandingan (*counter-narrative*) terhadap isu-isu negatif.

Penelitian menemukan bahwa pesantren yang aktif memproduksi konten edukatif di media sosial, seperti video singkat tentang fikih, adab, atau kisah santri inspiratif, mengalami peningkatan kepercayaan publik. Konten semacam ini bukan hanya membangun citra positif, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai spiritual dengan format yang akrab bagi generasi muda.

Langkah digitalisasi ini dapat dikategorikan dalam tiga bentuk: *Pertama*, Konten edukatif dan dakwah moderat. Pesantren menampilkan wajah Islam yang damai, kontekstual, dan solutif. *Kedua*, Transparansi kegiatan dan prestasi santri. Melalui publikasi digital, pesantren menegaskan bahwa mereka adalah lembaga pendidikan berprestasi, bukan tertutup. *Ketiga*, Kolaborasi digital antar-pesantren. Beberapa pesantren mulai membentuk network media internal yang memperkuat penyebaran narasi bersama.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *brand storytelling* (Argenti, 2013), di mana lembaga memperkuat citra positifnya dengan bercerita tentang nilai, perjuangan, dan kontribusi sosialnya. Dalam konteks pesantren, cerita tentang kiai yang membangun masyarakat, santri yang berinovasi, atau alumni yang berkontribusi sosial dapat menjadi simbol rebranding moral *institution* yang kuat. Salah satu hasil analisis paling signifikan adalah munculnya kesadaran bahwa pesantren perlu menegaskan kembali identitas sosialnya bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi sebagai aktor pembangunan sosial-humanistik.

Dalam teori *institutional trust* (Fukuyama, 1995), kepercayaan publik dibangun ketika lembaga menunjukkan kontribusi nyata terhadap kepentingan bersama. Pesantren yang aktif dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan masyarakat, dan penanganan isu sosial terbukti lebih cepat memulihkan kepercayaan publik.

Temuan lapangan menunjukkan beberapa strategi rebranding sosial yang berhasil: *Pertama*, Program pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat. Beberapa pesantren mendirikan koperasi dan unit usaha yang melibatkan warga sekitar, memperkuat relasi sosial dan ekonomi. *Kedua*, Partisipasi dalam isu kemanusiaan. Pesantren menjadi pusat bantuan sosial pada saat bencana, pandemi, atau krisis kemasyarakatan. *Ketiga*, Keterlibatan dalam pendidikan publik. Pesantren kini banyak membuka madrasah umum dan program literasi, menunjukkan keterbukaan terhadap sains dan kemajuan zaman. Strategi ini bukan hanya taktis, tetapi juga simbolis, menegaskan bahwa pesantren adalah lembaga yang berfungsi sosial dan berorientasi kemanusiaan, bukan sekadar lembaga ritual.

2. Restorasi Kepercayaan Publik: Sinergi Kiai, Santri, dan Media

Rekonstruksi citra pesantren tidak dapat dilakukan secara individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan proses ini tergantung pada sinergi antara otoritas kiai, partisipasi santri, dan kolaborasi media. Kiai berperan sebagai sumber otoritas moral yang menjamin keaslian nilai-nilai pesantren. Santri muda berperan sebagai komunikator publik yang memahami bahasa media dan teknologi. Media berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pesantren dan masyarakat luas.

Beberapa pesantren mulai membentuk tim humas santri, mengajarkan santri untuk menulis berita, mengelola media sosial, dan memproduksi konten positif.

Pendekatan ini mengubah pesantren dari lembaga tertutup menjadi komunitas komunikatif yang adaptif. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak dibangun melalui klarifikasi reaktif, tetapi melalui komunikasi proaktif dan konsisten. Publik akan percaya pada lembaga yang terbuka, bukan yang sekadar membela diri.

Rekonstruksi citra pesantren pada hakikatnya bukan sekadar strategi media, tetapi gerakan kultural untuk mengembalikan makna pesantren sebagai poros peradaban spiritual dan sosial. Melalui komunikasi yang jujur, terbuka, dan inklusif, pesantren dapat merebut kembali otoritas moral di tengah masyarakat digital yang bising oleh hoaks dan sensasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa *trust recovery* tidak hanya membutuhkan inovasi komunikasi, tetapi juga keautentikan nilai. Pesantren yang berhasil membangun kembali kepercayaan publik adalah yang tetap setia pada prinsip ikhlas, *tawadhu*, dan *khidmah*, namun dikemas dalam bahasa publik yang relevan.

Dengan demikian, strategi rekonstruksi citra yang efektif bukanlah meniru gaya komunikasi modern semata, tetapi menghadirkan kembali nilai-nilai lama dalam bentuk yang baru, menggabungkan spiritualitas tradisi dengan keterbukaan modernitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari fenomena pesantrenofobia, yaitu munculnya ketakutan sosial terhadap lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. Fenomena ini menandakan adanya krisis kepercayaan yang bersifat sosial, kultural, dan epistemologis terhadap salah satu pilar pendidikan Islam di Nusantara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teoretis, dapat disimpulkan bahwa pesantrenofobia bukanlah gejala yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses panjang interaksi antara masyarakat, media, dan perubahan budaya modern.

Secara sosial, modernisasi dan urbanisasi telah menciptakan jarak nilai antara masyarakat modern dengan kehidupan tradisional pesantren. Dalam konteks masyarakat yang semakin rasional dan materialistik, pesantren sering kali dipersepsikan sebagai lembaga “*terbelakang*” karena pola hidupnya yang sederhana, disiplin ketat, dan berbasis nilai spiritual.

Sementara secara kultural, ketakutan ini juga diwarisi dari narasi historis yang memosisikan pesantren sebagai pusat konservatisme atau bahkan perlawanan terhadap sistem modern. Citra ini dipelihara oleh sistem simbolik dan representasi sosial yang jarang memberi ruang bagi wajah progresif pesantren. Dengan demikian, pesantrenofobia dapat dipahami sebagai akibat dari konstruksi sosial yang gagal memahami pesantren dalam konteks nilai dan fungsinya yang otentik.

Penelitian ini menemukan bahwa media massa dan media sosial berperan signifikan dalam memperkuat pesantrenofobia. Melalui mekanisme framing dan penyebaran misinformasi, pesantren sering kali ditampilkan dalam bingkai berita yang sensasional, terutama ketika muncul kasus kekerasan atau penyimpangan yang dilakukan individu. Sayangnya, media jarang menampilkan sisi humanis, inovatif, dan kontribusi sosial pesantren terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Argenti, P. A. 2013. *Corporate Communication* (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education
- Basuki, Agung. (2021). Pembangunan Pendidikan di Provinsi Banten. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 3 (1): 99-114.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. USA: Penguin Group.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Entman, R. N. 1993. *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press
- Grunig, J. E., & Hunt, T. 1984. *Managing Public Relations*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Gustina, N., Iis, S., Anggi, P. W., & Abdul. H. (2022). Ekstrakurikuler Marching Band Sebagai Salah Satu Sarana Pendidikan Karakter di SDN Merayu Utara 02 Pagi. *Seminar Nasional Ilmu Pendidikan dan Multidisiplin V*. (40-28).
- Hak, N., Mustaqim, A., Baidhowi, A., Salahudin., & Zuhri, S. (2023). Genealogi dan Jaringan Keilmuan Pesantren Modern di Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yogyakarta: semesta Aksara.

- Hendrik, B. & Awal, H. (2022). Pengenalan Teknologi Robotika pada Anak Sekolah Dasar. *Junal PKM Bangsa*. Vol. 1:1 (46-52).
- Luhmann, N. 1979. *Trust and Power: Two Works by Niklas Luhmann*. Chichester: John Wiley & Sons
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. Arizona State: SAGE.
- Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).
- Romdona, S., Junista, S.S. & Gunawan, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>

